



Buletin **Parlementaria**

Nomor 987/V/XI/2017 • November 2017

**Efektivitas Siklus Birokrasi
Dipengaruhi Tingkat
Literasi Masyarakat**

**Indonesia Hadapi Tantangan
Kesetaraan Akses Digital**



**BI Diharapkan Mampu
Angkat Taraf Hidup
Masyarakat Daerah**

TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

BI Diharapkan Mampu Angkat Taraf Hidup Masyarakat Daerah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan berharap kehadiran Kanwil Bank Indonesia di masing-masing provinsi mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah. Melalui program CSR, masyarakat bisa memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan roda perekonomian di daerah.

Demikian disampaikan saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi XI ke Padang, Sumatera Barat, Selasa (21/11/2017). Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil

Bank Indonesia Sumatera Barat Endy Dwi Tjahyono.

Ketika meninjau lokasi persawahan bunga pasang di Sumatera Barat, Marwan memberikan apresiasi atas program binaan BI yang mampu menghasilkan produksi bawang dengan kualitas yang tinggi. Namun menurutnya capaian ini perlu ditingkatkan.

“Di sini masyarakat gunakan sawah untuk pengelolaan bawang. Harapan kita, BI untuk program CSR tidak hanya selesai pada produksi bawang. Tapi bagaimana bawang yang diproduksi dengan bimbingan BI dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap Marwan.

Politisi Demokrat ini yakin BI yang memiliki sumber daya manusia berkualitas mampu memberikan bimbingan bagi masyarakat untuk mengangkat taraf hidup

di daerah. “Kita ingin masyarakat punya penghasilan yang lebih baik, jadi ini bukan saja kegiatan semusim. Nah kita ingin BI di daerah hadir untuk fungsi itu. Makanya Kantor BI hampir di seluruh Indonesia ada. Harapannya BI bisa dampingi masyarakat,” jelas Marwan.

Pemerintah Daerah, lanjut Marwan, diharapkan juga mampu bersinergi dengan BI di daerah. Keduanya memiliki peran yang saling berkaitan, jika pemda adalah pengambil kebijakan maka BI diharapkan mampu menjadi *think thank* dengan memberikan kajian-kajian yang mampu dijadikan rujukan kebijakan.

Saat melihat langsung lokasi persawahan tampak terlihat *output* yang dihasilkan seperti suburnya tanaman bawang dan antusiasme masyarakat cukup tinggi menyambut kehadiran Komisi XI ini. ■

(hs/sc) Foto: Hendra



Tim Kunspek Komisi XI DPR berdialog dengan Kepala Kanwil BI Sumbar dan Petani Bawang membahas program sosial Bank Indonesia di bidang pertanian.



Setelah UU Desa Pembangunan Merata Ke Seluruh Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah sangat bersyukur setelah UU Desa diberlakukan pada masa Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, pembangunan bisa menjangar ke seluruh Indonesia. Bahkan, pipa-pipa pembangunan telah menjangar ke 75 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah hadir acara HUT ke 14 Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat.

“Di kabupaten Sumbawa dan NTB pada umumnya, 1,7 sampai 2,5 miliar dana desa mengalir ke seluruh desa yang ada di Prosinsi NTB ini,” kata Fahri saat menyampaikan sambutannya pada acara HUT ke 14 Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat, Minggu (19/11/2017).

Fahri mengatakan bahwa DPR akan terus menuntut Pemerintah Pusat agar mau melakukan pemekaran. Karena DPR telah siap membahas seluruh agenda daerah otonomi baru, termasuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di masa yang akan datang. Apalagi, Komisi II dan Pimpinan DPR secara umum sudah menginginkan ini.

“Karena dengan memekarkan daerah, masyarakat tidak meminta uang tetapi meminta kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Dan ini yang terjadi di Sumbawa Barat, dan alhamdulillah dengan ikhtiar pemekaran 14 tahun yang lalu, maka pada hari ini kita menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Fahri lagi, perkembangan Kabupaten Sumbawa Barat telah melampaui indeks pembangunan manusia yang paling tinggi di antara kabupaten dan kota yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat ini.

“Mudah-mudahan ini bisa mempercepat, tidak saja Kabupaten Sumbawa Barat tetapi seluruh NTB dan juga seluruh Indonesia keluar dari garis kemiskinan menjadi negara yang tangguh dan kuat karena desanya kuat diisi oleh masyarakat yang kuat dan berdaulat,” harap anggota dewan daerah pemilihan NTB itu mengakhiri sambutannya.

Rangkaian upacara HUT ke 14 Sumbawa Barat ini juga dihadiri antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeliono mewakili Presiden Jokowi, Bupati Sumbawa Barat H.W. Musyafirin, serta jajaran pemerintah kabupaten Sumbawa Barat.

Terkait HUT ke 14 Sumbawa Barat, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu merasa bersyukur melihat Kabupaten Sumbawa Barat, NTB di usianya ke 14 tahun ini telah mencapai banyak hal. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, bahwa inisiatif pemekaran itu selalu baik. ■

(so). Foto: Dok. Parleod.

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patulli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Akza Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharjanto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,
Nur Sakila Rahmah, S.Ikom

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan, IZZI Fauzul Umam
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Efektivitas Siklus Birokrasi Dipengaruhi Tingkat Literasi Masyarakat



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Semarang.

Sistem demokrasi yang baik menuntut masyarakatnya memiliki kesadaran literasi yang tinggi. Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan, permusyawaratan perwakilan yang tertuang dalam butir Pancasila menjadi esensi nilai demokrasi yang dianut Indonesia.

Prinsip demokrasi pada prosesnya memerlukan masyarakat yang terdidik, sadar literasi, memiliki tingkat intelektualitas yang mumpuni. Melalui kegiatan mengajar di perguruan tinggi Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berusaha membangun kesadaran literasi di kalangan mahasiswa.

Demokrasi yang ideal menuntut terbentuknya warga negara yang sadar dan paham terhadap setiap kebijakan politik dan birokrasi pemerintahan, yang bisa disebut melek politik atau literasi politik. Menurut Taufik, membangun kesadaran literasi publik penting dilakukan oleh lembaga pendidikan, karena kesadaran

literasi meningkatkan kualitas demokrasi.

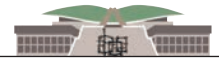
“Dalam demokrasi kesadaran literasi itu kan tingkat kematangan dari rakyat pemilih sangat tergantung bagaimana masyarakat memahami tugas dia sebagai pemilih,” ujar Taufik saat memberikan materi kuliah di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (18/11/2017).

Pada kesempatan mengajar tersebut Taufik, memberikan materi kuliah tentang reformasi birokrasi. Dia menekankan efektifitas siklus birokrasi dipengaruhi tingkat literasi masyarakat. Karena literasi politik masyarakat yang tinggi memberikan keterampilan dan kemampuan memahami

isu politik secara komperhensif, dengan begitu masyarakat mampu menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Dalam materi kuliah reformasi birokrasi Watua DPR RI Bidang Kordinator Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan, hampir semua kehidupan warga negara tersentuh dengan birokrasi. Semua kehidupan masyarakat dicampuri oleh birokrasi. Contohnya urusan administratif warga seperti surat keterangan yang diberikan otoritas pemerintahan surat izin stempel dan lain sebagainya.

Dia menjelaskan, segala macam administrasi publik tergantung pada birokrasi negara yang ahli dalam berbagai hal. Di situlah letak kekuatan birokrasi, para birokrat memiliki akses informasi-informasi penting yang dimiliki negara. “Birokrasi pemerintah menguasai data informasi penting negara. Oleh sebab itu birokrasi dapat mengarahkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah,” papar Taufik.



Pejabat politik negara juga sering melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada birokrasi, karena birokrat ahli dalam hal-hal teknis. Birokrat juga merupakan unsur support dalam penyusunan kebijakan publik. Taufik juga menjelaskan, keahlian dan penguasaan sumber informasi menjadi sumber kekuatan politik para birokrat, namun birokrat tidak boleh berpolitik.

Saran dari birokrat juga lebih diakui dalam proses penyusunan kebijakan karena mendorong dan mengupayakan mana yang harus dipilih. Setelah masalah diidentifikasi formulasi pemecahan masalah birokrasi memainkan peran dalam menyusun dan melahirkan proposal proposal kegiatan.

Saat mengajar, Taufik fokus pada materi akademis dan teoritis. "Kalau lagi ngajar ya saya tidak berpolitik praktis, semua akademis ilmiah. Kita harapkan bermanfaat pengalaman yang saya peroleh, saya tuangkan dan saya tularkan kepada mahasiswa doktor S III dan S II," ungkap Taufik.

Taufik yang juga merupakan Doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro menjalankan kegiatan mengajar sebagai panggilan jiwa. Hal tersebut dia ungkapkan sesaat setelah mengajar. "Mengajar memang panggilan jiwa saya, karena dulu memang saya suka ngajar. Jadi memang dulu basic saya pernah mengajar, dan memang ada kepuasan tersendiri pada saat kita membagi ilmu kita kepada mahasiswa," paparnya.

Naluri mengajarnya memang sudah ada sejak dulu, saat menjadi mahasiswa di Undip dia pernah menjadi asisten dosen. Di kampus ini dia berkuliah mulai sejak S I, S II sampai dengan S III. Selain mengajar di Pasca Sarjana Undip dia pun mengajar di Program Studi Doktor Administrasi Publik. Baginya mengajar sebagai pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karena perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya dalam kehidupan bangsa dan negara berperan penting dalam pembangunan negara di berbagai aspek. Melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, universitas mampu melahirkan generasi bangsa yang menentukan arah kemajuan negara. Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi kewajiban para alumni sebagai darmabakti untuk negeri. ■

Indonesia-Polandia Perlu Meningkatkan Kerjasama di Sektor Pertanian

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kunjungannya ke Polandia melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan H.E Mr Krzysztof Jurgiel di Kantor Kementerian Pertanian Polandia, Senin waktu setempat (20/11/2017).

Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dan Anggota Komisi X Anang Hermansyah menyatakan, Kunjungan Kerja DPR RI kali ini menginginkan peningkatan kerja sama di berbagai bidang, utamanya bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan pertahanan dengan Polandia.

"Kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana strategi pemerintah Polandia dalam meningkatkan sektor pertanian. Selain itu, pertemuan ini juga sebagai forum yang kondusif untuk mendiskusikan peluang-peluang yang mungkin terjalin dalam merealisasikan MoU pertanian yang sudah terbentuk," ungkap Fadli Zon.

Mr Krzysztof Jurgiel selaku Menteri Pertanian menyampaikan pentingnya membuka akses pasar Polandia di Indonesia. Keterbukaan pasar Indonesia menjadi kunci dalam menjalin hubungan kerja sama Indonesia-Polandia. Selain itu Polandia juga menawarkan alat mesin pertanian yang berkualitas dan terbuka

untuk dilakukan joint investment.

Fadli Zon sebagai Ketua Delegasi Kunjungan Kerja DPR RI ke Polandia yang juga Ketua Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) menyatakan pentingnya Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertanian khususnya dalam rangka pendidikan, riset, serta teknologi pertanian.

"Saya menyambut baik penawaran yang disampaikan Menteri Pertanian Polandia untuk membuka pasar ke Indonesia, salah satunya ekspor daging sapi ke Indonesia. Yang terpenting daging impor tersebut memenuhi tiga syarat, yaitu dagingnya halal, bebas dari penyakit kuku dan mulut, juga harganya bisa bersaing" ungkap Fadli Zon.

"Saya kira harga daging sapi di Polandia masih tergolong murah dengan harga daging sekitar 2 sampai 3 dolar AS per kilogram. Ini sangat murah dan masuk akal daripada kita membeli daging sapi dari Australia atau Selandia Baru, yang mahal. Kita harus melakukan diversifikasi tujuan ekspor, termasuk juga bila kita membutuhkan impor," jelas Fadli Zon.

"Sejauh ini, nilai perdagangan RI-Polandia berkembang dengan baik. Pada tahun 2016, total nilai perdagangan kedua negara sebesar USD 513,11 juta; meningkat 0,76% dibanding tahun sebelumnya, dengan surplus Indonesia sebesar USD 226,93 juta. Sementara tahun 2015, nilai perdagangan bilateral tercatat sebesar US\$ 509,26 juta, dengan surplus di pihak Indonesia senilai US\$ 208,51 juta".

"Kerja sama antara Indonesia dengan Polandia, khususnya di bidang pertanian bisa terus dioptimalkan. Sebab Polandia merupakan negara dengan luas wilayah yang cukup besar dan memiliki produk unggulan di bidang pertanian," ungkap Fadli Zon. ■



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat bertemu dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan H.E Mr Krzysztof Jurgiel.

(eko.mp) Foto: Ekolod

(sc). Foto: Dok. Parle/od

Kebijakan Bebas Visa Berdampak Positif dan Negatif

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif.

“Kebijakan bebas visa untuk negara memang ada dampak positifnya. Tapi juga ada dampak negatifnya. Khusus untuk dampak yang positif kita dorong. Untuk menghasilkan devisa bagi bangsa dan negara, kita teruskan,” kata Hasanuddin, usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Sementara untuk dampak negatifnya, lanjut Politisi F-PDI Perjuangan itu, ada negara yang justru malah memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan, seperti kriminalisasi dan peredaran narkoba. Hal itu akan menjadi pertimbangan.

“Misalnya negara tertentu, ternyata dengan bebas Visa itu kunjungan turisnya melonjak dan tak ada masalah, ya bagus. Tapi ada negara yang malah bawa narkoba dan sebagainya, dan tidak ada turis, ya kita eliminasi,” tandas Hasanuddin.

Ia menambahkan, dari 167 negara itu akan dievaluasi, negara mana saja yang bernilai positif untuk kepentingan Bangsa dan Negara, dan negara mana yang memerlukan kehati-hatian. Ia enggan menyebutkan negara yang dianggap

memberikan dampak negatif dari kebijakan bebas Visa itu.

“Tiap bulan ada data dari kepolisian, kalau itu menyangkut pelanggaran hukum. Kalau itu menyangkut keimigrasian, kita tanya ke Dirjen Imigrasi. Dan kemudian kita analisa, hasilnya kita serahkan kepada pemerintah. Ini masukan dari Panja Kebijakan Bebas Visa,” tandas politisi asal dapil Jabar itu. ■



Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

(si/mp), Foto: Azka/od

Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari Standard Chartered ke Singapura. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995.

“Sesuai UU itu, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sudah semestinya aparat hukum harus terus menjalankan tupoksinya, agar semua

menjadi terang benderang,” tegas Muslim dalam rilisnya, Selasa (21/11/2017).

Politisi F-PAN itu menambahkan, Pasal 101 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penjelasannya menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

Disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

“Jika memang terbukti dana sebesar itu dari dugaan tindak pidana pencucian uang, tentunya bisa jadi muncul dugaan kerugian negara dan ada pihak-pihak yang harus dipanggil untuk diperiksa. Perlu didalamai dan pembuktian, jangan sampai dibiarkan mengambang, yang makin menambah kurangnya kepercayaan publik terhadap aparat hukum kita,” imbuah politisi asal dapil



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani.

Komisi II Setujui Usulan Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU RI, Bawaslu RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda rapat membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

per Bawaslu dan per PKPU tersebut.

Usai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, Komisi II sepakat untuk menyetujui usulan substansi perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

“Komisi II DPR RI menyetujui atas usulan substansi terhadap perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dengan memasukkan keputusan Mahkamah konstitusi,” ujar Mardani.

Dengan disetujui usulan substansi PKPU Nomor 3 Tahun 2017 itu, maka

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 itu nantinya akan berubah menjadi PKPU Nomor 15 Tahun 2017. “Komisi II DPR menyetujui usulan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah menjadi PKPU Nomor 15 tahun 2017,” tuturnya.

Sementara dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu RI Abhan membahas beberapa perbawaslu, diantaranya adalah perbawaslu penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, rancangan perbawaslu yang juga didiskusikan antara lain mengenai penanganan administrasi pemilu, penanganan verifikasi parpol, dan perbawaslu pemantau pemilu, perbawaslu pemilihan berkaitan dengan Bawaslu logistik, perbawaslu daerah khusus, dan perbawaslu pemantau pemilu. ■

(dep.mp) Foto: Jayadi/rod

“Ada delapan rancangan perbawaslu dan rancangan peraturan KPU yang bermaksud untuk menyempurnakan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Mardani mengatakan, Komisi II ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari Bawaslu dan PKPU terkait

Aceh itu.

Diketahui, hasil investigasi Otoritas Moneter Singapura (MAS) terhadap Standard Chartered terkait transfer dana sebesar 1,4 miliar dollar AS atau setara Rp 19 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura, sampai saat ini oleh pemerintah Indonesia masih belum jelas.

Pasalnya, belum ada transparansi mengenai apakah dana tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diberitakan media asing, di mana transfer tersebut dilakukan oleh klien dari Warga Negara Indonesia.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui, mendapatkan informasi tersebut. Namun ia belum mengetahui 81 nama-nama nasabah yang melakukan transfer dana yang sangat besar itu, seperti misalnya isu tentang keterlibatan beberapa kolega

konglomerat Indonesia hingga anggota keluarga perusahaan besar mulai dari perusahaan tambang, hingga salah satu perusahaan transportasi taksi terbesar di Indonesia, mantan pejabat, serta beberapa tokoh Indonesia lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugasteady mengungkapkan, kasus transfer Rp 19 triliun melalui Standard Chartered Plc tidak melibatkan 1 nasabah, namun 81 nasabah warga negara Indonesia.

Menurutnya, sulit mengetahui adanya transfer senilai 1,4 miliar dollar yang dilakukan oleh WNI sejak beberapa bulan lalu dan Ken memastikan, 81 nasabah yang melakukan transfer dari Guernsey Inggris ke Singapura adalah wajib pajak pribadi bukan badan. Namun hingga saat ini, Ditjen Pajak masih mendalami lebih jauh terkait dana transfer tersebut. ■



(sf.mp) foto: andri/rod

Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub.

Komisi V Apresiasi Pembangunan Jalur Kereta Api Segmen Barru - Parepare



Ketua Tim Kunspek Komisi V DPR RI Muhidin M. Said saat meninjau pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi.

Keinginan masyarakat Sulawesi akan moda transportasi kereta api sedikit demi sedikit mulai terwujud. Saat ini di Sulawesi Selatan tengah dibangun jalur kereta api Trans Sulawesi segmen Barru – Parepare. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas pembangunan jalur kereta api segmen Barru – Parepare ini, dan akan mendorong agar pembangunannya cepat terealisasi.

“Jadi apa yang dicita-citakan masyarakat akan adanya kereta di Sulawesi ini sudah menjadi suatu kenyataan, pembangunan sudah berjalan dengan bagus tentunya ini akan kita dorong terus, agar betul-betul realisasi dijanjikan menyangkut masalah lintas Sulawesi *railways* bisa terwujud,”

ujar Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Muhidin M. Said saat meninjau pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi segmen Barru Parepare di Kabupaten Barru, Kamis siang (16/11/2017).

Muhidin memberikan apresiasi, karena pembangunan rel kereta api ini telah

mendapat dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Barru. “Pengalihan lahan tanahnya termasuk mudah dalam melakukan negosiasi sehingga tidak ada hal-hal yang bisa menghambat, artinya masyarakat sangat mendukung perencanaan pembangunan rel kereta api ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Barru Suardi Saleh yang mendampingi Tim Komisi V memaparkan bagaimana upaya pembebasan lahan hingga tidak ada masalah dan walaupun ada kendala kecil tapi bisa diselesaikan. “Memang sempat ada kendala lahan pekuburan dan ada sedikit salah bayar tapi semua dapat diselesaikan, ada jalan



N PERHUBUNGAN ERETAAPIAN



Bendungan Karalloe di Gowa Segera Dibangun

Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan segera dibangun setelah mangkrak selama tiga tahun. Bendungan ini segera bisa dimanfaatkan masyarakat Gowa pada 2019.

lahan dengan cara konsinyasi dan eksekusi. Ada 127 KK yang masih bermasalah dengan pembebasan lahannya. Setelah dilakukan sosialisasi selama 1 minggu, pembebasan lahan pun bisa dieksekusi.

Demikian terungkap saat Tim Komisi V DPR RI menggelar pertemuan dengan Bupati Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan, Kamis (15/11/2017) di Kantor Bupati Gowa.

Bendungan ini kelak bisa dimanfaatkan masyarakat Gowa untuk penyedia air sebanyak 0,44 m3 per detik. Selain itu bisa digunakan untuk pengendali banjir dan pembangkit listrik. Anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek ini pada 2017 sebesar Rp 99 miliar. Dan pada 2018 sudah dianggarkan Rp 170 miliar. Sementara kebutuhan lahannya seluas 230 hektar. 216 hektar sudah dibebaskan dan 113 hektar sudah terima ganti rugi.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Surato yang memimpin kunjungan Komisi V ini menyerukan agar bendungan yang dibiayai APBN itu segera dirampungkan. Dengan kunjungan ini, Komisi V ingin mengetahui progres pembangunan bendungan ini yang mangkrak karena persoalan pembebasan lahan.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Tim Komisi V mengapresiasi langkah yang diambil Bupati Gowa dalam menyelesaikan persoalan proyek nasional ini. Anggota Komisi V Hamka B. Kady dari dapil Sulsel menyatakan terus kosen memperjuangkan anggaran untuk pembangunan Bendungan Karalloe, baik di Komisi maupun Banggar DPR. Hamka juga memuji kinerja Kepala Balai Air dan Sungai Kemen PUPR yang cepat beraksi menyelesaikan bendungan. ■

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dalam penjelasannya di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi V yang hadir mengatakan, pihaknya pernah ditelepon Menteri PU agar bendungan yang mangkrak itu segera diselesaikan. Adnan lalu menyelesaikan pembebasan

keluar,” tutur Suardi.

Lebih lanjut Bupati Barru memaparkan bahwa dalam jangka waktu proses pembangunan rel kereta api makin banyak uang yang berputar di Kabupaten Barru “Semoga pasca daripada pembangunan akan memberikan dampak yang luar biasa pada Kabupaten Barru seperti rencana awal nanti ini dari Makassar ke Pelabuhan Garongkong nanti ini ada interkoneksi antar moda transportasi,” jelas Suardi.

Sasaran awal interkoneksi antar moda ini antara lain arus transportasi dari Makassar mengangkut barang dan Semen Tonasa serta Semen Bosowa juga aneka tambang lain seperti batu bara klinker. ■

(ran/sc), Foto: Rizka/od.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Surato (tengah).

(mh/sc), Foto: Husen/od.

RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg



Ketua Baleg Supratman Andi Agtas (kiri) bersama Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto (kanan) memimpin Rapat Baleg Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik di Gedung DPR.

Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik. Rapat Baleg ini juga dihadiri pengusul RUU tersebut, yaitu Komisi X DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Totok menyampaikan, Baleg telah menerima surat dari Pimpinan Komisi X tentang penyampaian Naskah Akademik dan draft RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik. Komisi X telah meminta Baleg, lanjut Totok, untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU dimaksud.

Politisi PAN ini mengatakan, RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya

Rekam, dan Karya Elektronik telah memenuhi syarat formal untuk diajukan. "Sebab RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik terdaftar dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017," ungkap Totok di ruang rapat Baleg Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Dia juga menjelaskan Baleg telah melakukan kajian atas RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yang meliputi aspek

teknis, aspek substantif, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan yang ada dalam RUU. Disamping itu, kajian juga dilakukan antar RUU dengan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam aspek substansi, Baleg mengusulkan, sebaiknya judul yang memuat "karya elektronik" diubah menjadi "karya digital" agar sinkron dengan "cetak dan rekam". Selain itu karya elektronik merujuk pada alatnya bukan proses untuk menghasilkan karya tertentu. Perubahan menjadi "karya digital" akan memungkinkan karya seperti *software*, aplikasi dan *games* yang banyak dihasilkan dewasa ini juga termuat di dalamnya. Sehingga judul RUU ini menjadi Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Digital.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah menyampaikan tentang landasan filosofis RUU tersebut. Menurutnya RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik merupakan upaya pelestarian budaya bangsa sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan tujuan bernegara yang diatur dalam pembukaan UUD 1945. Adapun landasan sosiologis yang disampaikan Ferdi adalah, upaya pengumpulan karya rekam sebagai koleksi nasional, hasil karya budaya bangsa. ■

(eko/sc), Foto: Rumi/ini

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga penerima bantuan KUBE. Usaha yang dibantu program KUBE tersebut harus mampu bertahan dan terus maju.

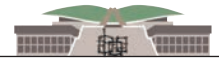
Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/11/2017) saat meninjau dua kelompok usaha penerima bantuan sosial KUBE. "Kube ini perlu ada penasihat usaha yang punya wawasan. Itu penting, bagaimana membuka jaringan,

segmen pasar, dan akses permodalan," katanya.

Setiap kelompok usaha harus mampu menciptakan kreativitas usaha dan produk yang menarik agar laku di pasaran. Kemitraan dengan calon konsumen atau pembeli perlu dilakukan. Begitu juga kemitraan dengan para pengusaha yang

sudah maju perlu dibangun. Bantuan sosial KUBE, sambung Surahman, bisa bervariasi. Tidak semua kelompok usaha menerima jumlah bantuan yang sama.

"Usaha yang mau berkembang perlu suntikan modal yang bervariasi. Kalau usaha pertukangan memang butuh modal besar. Tapi kalau kuliner tidak terlalu besar. Disuntik



Anggota Komisi VIII DPR, Surahman Hidayat (kiri) bersama warga penerima bantuan KUBE di Mamuju, Sulawesi Barat.

Rp 5-10 juta saja sudah cukup,” ujar politisi PKS itu. Surahman bersama anggota Komisi

VIII lainnya Ruskati Ali Baal sempat melihat dari dekat kelompok usaha pertukangan dan

pejualan barang campuran.

Bahkan di tempat yang sama keduanya juga melihat usaha mandiri penjual kemiri yang belum mendapat bantuan KUBE. Otoritas Kementerian Sosial yang mendampingi kedua anggota dewan ini menjelaskan, kriteria penerima bantuan sosial KUBE harus Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT), yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Rastra yang dibuktikan dengan kepemilikan KKS/KIS/KIP.

Setiap kelompok usaha harus beranggotakan 10 KPM. Satu KUBE mendapat bantuan sosial sebesar Rp 20 juta atau Rp 2 juta untuk satu KPM. Dana bantuan sosial ini hanya digunakan untuk modal usaha. Dan setiap KPM bila ingin mendapat akses bantuan KUBE harus membentuk kelompok usaha, lalu mengajukan proposal ke dinas sosial kabupaten/kota setempat. ■

(mhl/sc), Foto: Husen

Komisi VIII Dukung Kanwil Kemenag DIY Bangun Asrama Haji

Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Pasalnya, dengan harga tanah yang semakin tinggi, dikhawatirkan akhirnya rencana itu tak pernah terealisasi.



Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto saat pertemuan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Lutfi Hamid beserta jajaran di Kanwil Kemenag DIY, Rabu (22/11/2017). Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII dalam rangka melihat arah kebijakan dan program prioritas Kanwil Kemenag DIY ini, dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak.

“Kalau lahan itu tidak dibeli sekarang, maka harga tanah akan semakin tinggi, dan kita tidak akan pernah membeli. Padahal asrama haji DIY juga melayani bukan hanya jamaah haji di Yogyakarta saja, namun juga daerah sekitar Yogyakarta,” tegas Wenny.

Politisi F-PG itu melihat, harga tanah di Yogyakarta, khususnya Kulon Progo

semakin mahal. Ia mendapat info, semula harga tanah di kawasan bandara baru sekitar Rp 5 ribu per meter. Namun karena ada pembangunan bandara DIY, harganya melonjak hingga Rp 400 – 500 ribu per meter.

“Saya melihat pentingnya perhatian khusus dari Kementerian Agama untuk mengabdikan permintaan Kanwil Kemenag DIY. Apalagi Kanwil Kemenag DIY telah mengajukan berkali-kali, namun belum direalisasikan. Pembangunan ini sangat urgent, karena kondisi asrama haji yang ada saat ini, sangat terbatas,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Dukungan untuk segera membangun asrama haji ini pun datang dari Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI Deding Ishak. “Terkait pembangunan asrama haji, khususnya dalam hal pembebasan lahan, kami mendukung,” imbuh politisi F-PG itu.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DIY Muhammad Lutfi Hamid mengatakan, pihaknya berencana membebaskan lahan di areal kawasan bandara baru Yogyakarta seluas 5 hektar untuk asrama haji. Dengan estimasi harga tanah berkisar Rp 400 - 500 ribu per meter, maka dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 20 - 25 miliar.

“Tentu kami sudah memiliki berbagai pertimbangan untuk rencana ini. Alasan paling mendasar untuk optimalisasi pelayanan jamaah haji di DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi yang akan memanfaatkan bukan cuma kuota haji DIY saja,” jelas Lutfi. ■

(sifmp), Foto: Sojyan

BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji

Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapkan mampu menginvestasikan keuangan haji untuk kepentingan jamaah haji Indonesia. Investasi itu bisa berupa pembelian pesawat khusus haji dan hotel jamaah haji Indonesia di Mekkah atau Madinah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas BPKH dan BPKH sendiri di DPR, Selasa (21/11/2017).

“Di pundak BPKH inilah uang kurang lebih Rp 103 triliun dikelola. Dianjurkan anggaran itu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga ada penguatan di bidang ibadah haji. Syukur kalau kita punya hotel sendiri di Mekkah atau Madinah. Bahkan punya pesawat sendiri,” katanya.

Pengelolaan keuangan haji pada 2018 harus lebih maju, sehingga kualitas ibadah haji pun menjadi semakin baik. Saat ini aset keuangan haji belum sepenuhnya diserahkan ke BPKH dari Kementerian Agama. Diharapkan akhir 2017, sudah diserahkan seluruhnya. Saat ini BPKH masih menjalankan masa-

masa transisi. Namun, BPKH sendiri sudah punya anggaran transisi sebesar Rp 25 miliar untuk menjalankan program-program sementara.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu di hadapan rapat menyatakan, bila aset keuangan haji sudah

diserahkan 100 persen, maka badan yang dipimpinnya segera melakukan investasi. Namun, bila penyerahan aset tersebut mengalami keterlambatan maka akan ada kevakuman anggaran. “Kami mengusulkan adanya uang muka untuk melaksanakan program 2018 meskipun ada pengunduran pengalihan aset keuangan haji,” usul Anggito.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi menilai, apa yang dilakukan BPKH sejauh ini sudah *on the track*. Pemantauan dilakukan sejak 2017. Mengomentari kemungkinan adanya keterlambatan penyerahan aset, Yuslam mengatakan, BPKH perlu mengusulkan banyak hal untuk antisipasi. Pada 2018 nanti BPKH harus menginvestasikan dananya minimal lima persen. ■

(mh/sc), foto Azka/mi



Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad di dampingi Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis.

DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik

Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direksi PLN untuk menjelaskan perubahan alokasi daya listrik atau kelas golongan pelanggan listrik, agar tidak membingungkan masyarakat. Sebab, perubahan alokasi daya itu bagi masyarakat secara otomatis akan menaikkan biaya pembayaran listrik setiap bulannya.

“Ini bikin gaduh, jangan membuat kegaduhan baru, kami akan panggil Menteri ESDM dan Dirut PLN untuk meminta penjelasan program ini,” tegas Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dalam Dialektika Demokrasi ‘Penyederhanaan Listrik: Manfaat Atau Mudharat?’ di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta,

Kamis (16/11/2017). Hadir juga dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI M. Kurtubi.

Eni menambahkan, program penyederhanaan golongan listrik tersebut perlu dilakukan pengkajian secara mendalam, apakah masyarakat benar-benar butuh penambahan daya atau tidak. Menurutnya, jika pemerintah

mengklaim alokasi daya listrik ini tidak membebani masyarakat, maka Menteri ESDM harus menjelaskan.

“Kenapa pemerintah buat program ini, apa tujuannya, kalau untuk kepentingan rakyat tidak masalah, tapi kalau program ini buat gaduh, tolong lebih berhati-hati. Padahal, yang dibutuhkan adalah listrik murah,” tegas Eni.



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi bersama Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih hadir menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi.

Eni melihat, pernyataan Jonan yang menilai masyarakat akan lebih leluasa menggunakan listrik jika ditambah dayanya, hal ini belum tentu benar karena kebutuhan listrik masing-masing rumah tangga berbeda.

“Rakyat ini bertanya-tanya, biasa pakai 1.300 VA atau 900 VA non subsidi disuruh ke golongan 4.000 VA, masyarakat galau, abodemennya lebih mahal,” heran politisi F-PG itu.

Eni memaparkan, saat ini masih 18

juta rakyat yang masih membutuhkan subsidi listrik (900 VA), dan sebanyak 2.500 desa yang belum menikmati listrik. “Jadi, sebaiknya dana perubahan alokasi daya listrik dialokasikan untuk subsidi dan desa yang belum ada listriknya,” ungkap politisi asal dapil Jatim itu.

Tapi, lanjut Eni, kalau alokasi daya itu untuk mobil dan kompor listrik, maka pemerintah harus mengkaji terlebih dulu dan menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. “Mobil listrik itu mahal, dan kompor listrik harus disiapkan infrastrukturnya,” imbuh Eni.

Sementara itu, Kurtubi memastikan alokasi daya itu sendiri untuk memberi kebebasan kepada masyarakat untuk konsumsi daya listrik, dan pemerintah mendorong investasi industri untuk meningkatkan lapangan kerja.

“Alokasi penambahan dan pembebasan konsumsi daya listrik itu tidak dikenai biaya. Itu terserah masyarakat. Sebab, konsumsi listrik terus meningkat, dan agar lebih produktif dan mencerdaskan,” kata politisi F-Nasdem itu. ■

(si.mp), Foto: Rumi/ri

Setjen dan BK DPR RI Adakan Survei PMPRB

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengadakan Survei Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Ruang Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara 2, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti mengatakan bahwa survei integritas organisasi ini merupakan program nasional dari Kemen PAN-RB, “Kemen PAN-RB harus mengevaluasi program reformasi mental pada setiap Kementerian/Lembaga,” katanya.

“Kegiatan ini berguna untuk melihat sejauh mana program pelayanan publik yang kita sajikan kepada masyarakat dengan harapan nantinya memiliki nilai positif khususnya untuk kesejahteraan pegawai di DPR, mudah-mudahan

survei ini bisa diikuti dengan baik dan jujur,” tambahnya.

Wanita yang akrab dipanggil Maya ini mengatakan bahwa kegiatan ini terkait dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), “Kita memang belum 100% melakukan hal ini, tapi kita sudah banyak melakukan perbaikan di Setjen dan BK. Dengan cara revolusi mental dan penegakan hukum dengan membuat aturan-aturan dan *Standar Operational Procedure* (SOP) kerja, intinya kita sudah *on the track* dalam memberantas KKN,” tegasnya.



Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti.

Sementara itu Master Adiminstrasi Kepemerintahan dari Kemen PAN-RB Novalina Sipayung menjelaskan bahwa dengan adanya survei ini bisa terlihat seperti apa hasil yang didapat dari pegawai atau pejabat, “Mereka akan memberikan informasi yang sesungguhnya jika memang masih ada peluang-peluang untuk KKN kami akan merekomendasikan upaya untuk melakukan pencegahan,” kata Nova. ■

(chas.mp)/rni

Peran Pemerintah Dibutuhkan Dalam Pemerataan Bidan di Daerah

Bidan adalah profesi yang sangat penting perannya dalam menyelamatkan jiwa ibu dan anak saat melahirkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menyampaikan saat ini jumlah bidan di Indonesia cukup, namun jumlahnya tidak merata, sehingga peran serta pemerintah amat dibutuhkan dalam pemerataan kebutuhan bidan di daerah-daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Totok saat rapat Baleg bersama Pengusul RUU tersebut, Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

“Sekarang jumlah bidan kita ini cukup di seluruh Indonesia tetapi jumlahnya tidak merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tidak mendapat pelayanan yang cukup di bidang kebidanan. Karena itu perlu ada undang-undang kebidanan, perlu adanya peran serta pemerintah yang lebih fokus lagi sehingga soal distribusi ini bisa terpenuhi,” jelas Totok.

Totok juga menyampaikan kebutuhan pada undang-undang yang memberikan jaminan kepada profesi bidan merupakan tuntutan perkembangan. “Kemudian juga teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, maka profesi bidan juga tidak boleh ketinggalan. Banyak sarana teknologi yang lebih bagus lebih memudahkan pekerjaan lebih menjamin keselamatan ibu-ibu, itu perlu ada *update* terus menerus, sehingga bidan perlu ada undang-undang yang khusus tentang kebidanan,” paparnya.

Bahkan Totok juga mengusulkan

dalam RUU ini idealnya juga mengatur tentang pengangkatan Bidan PTT menjadi PNS. “Termasuk payung hukum Bidan-bidan PTT ini bisa diangkat jadi PNS, dan itu menurut saya penting ya, karena bidan kan punya tugas yang sangat vital, mereka perlu ada jaminan dalam profesinya, juga membutuhkan tanggung jawab, ini kan menyangkut pelayanan kepada seluruh masyarakat kita,” ungkapnya.

Sebelumnya Baleg dan Komisi IX juga telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan. Kedua belah pihak melakukan pengkajian atas RUU dan Naskah Akademik, yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan ada pembentukan poin tambahan yang diperlukan dalam perundang-undangan. ■

(eko/sc), Foto : Rumi/tn



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas bersama Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto, Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay dan Anggota Komisi IX Marinus Gea berbincang usai rapat pengharmonisasian RUU Kebidanan di Gedung Nusantara I DPR.



Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima DPRD Kalsel.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Diperlukan dalam Pembentukan Perda

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk mendorong adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap konsepsi tentang pembuatan peraturan daerah (Perda). Dengan dilakukannya harmonisasi itu bisa diketahui konsep perda yang sedang dibuat apakah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kemungkinan adanya pembatalan perda dapat diantisipasi.

“ Kita memiliki hierarki jangan sampai perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang sudah ada,” ujarnya usai audiensi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DPR, Selasa (21/11).

Kedatangan DPRD Kalsel tersebut untuk berkonsultasi mengenai proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Regulasi baik dari aspek materi maupun substansinya. Dalam kesempatan itu Johnson menekankan, bagaimana Raperda itu betul-betul nantinya tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak

dibatalkan serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga harus melalui penelitian.

“Proses penyusunan perda itu harus dilakukan dengan penelitian, baik penelitian hukum atau penelitian sosial. Yang penting ada naskah akademik yang merupakan argumentasi ilmiah terhadap konsep yang akan dibuat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Burhanudin mengatakan, kehadirannya ke BK DPR adalah dalam rangka untuk memantapkan pembuatan perda. “ Kami minta petunjuk dalam menguatkan pembuatan perda di daerah khususnya Kalsel,” ungkapnya. ■

(ndy/imp), foto:arif/infri

Indonesia Hadapi Tantangan Kesetaraan Akses Digital

Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mencapai kesetaraan akses digital. Kondisi geografis yang sangat luas dan beragam, dibarengi dengan populasi yang sangat besar membuat pemerataan koneksi broadband nasional sebagai pekerjaan besar pemerintah saat ini.



Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat menghadiri diskusi dengan Global Affairs Canada di Ottawa, Kanada.

“Saat ini terjadi tren pemanfaatan media sosial oleh generasi muda untuk menyampaikan aspirasi dan pilihan politiknya. Generasi muda berada dalam posisi strategis bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi

juga sebagai *news generator* dan *content creator*,” kata Anggota Komisi X DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat menjadi panelis dalam diskusi dengan Global Affairs Canada di Ottawa, Kanada, Kamis (16/11/2017).

Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai, peran besar media digital dalam politik sangat terlihat pada Pilkada DKI 2012, Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, dan diprediksi akan terus meningkat hingga tahun politik 2018-2019.

Namun, tambah Irine, Infrastruktur digital yang belum merata dan menjangkau semua kalangan menjadikan promosi partisipasi kaum muda dalam politik saat ini lebih terpusat di kota-kota besar. Irine menggarisbawahi kondisi riil di lapangan. Saat ini akses digital masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar kalangan muda terutama yang bermukim di kawasan Indonesia timur.

“Bagi yang telah memiliki akses, tantangan selanjutnya adalah literasi digital sehingga dapat memilah informasi yang terpercaya, layak untuk di-*share*, hingga memproduksi konten berkualitas. Kita sudah mulai memikirkan integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan. Hal ini untuk menciptakan generasi yang mampu bertanggung jawab atas akses digital di tangan mereka,” imbuh politisi asal Dapil Maluku Utara itu.

Diskusi panel ini merupakan inisiatif Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Global Affairs Canada (Departemen Luar Negeri Kanada). Global Affairs Canada merupakan salah satu mitra IPU untuk agenda kesetaraan gender dan dukungan pemberdayaan perempuan. Saat ini, Irine dipercaya bertugas sebagai Board Member Forum of Young Parliamentarians IPU.

Acara ini bertujuan mendiskusikan peluang dan tantangan yang dihadapi anggota muda parlemen dalam mempromosikan demokrasi, pemerintahan inklusif, hak asasi manusia dan partisipasi aktif pemuda dalam politik. Internet dan segala dinamikanya dipercaya sebagai alat penting untuk mencapai tujuan tersebut. ■

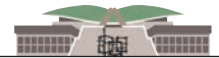
(sfs/c), foto: Dok/ini

MKD Tunggu Proses Hukum Setya Novanto

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir merespon cepat terkait perkembangan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan melakukan rapat pimpinan guna menghimpun suara setiap fraksi. Hingga akhirnya diputuskan MKD mengambil sikap menunggu proses hukum yang saat ini tengah berjalan.

“Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada dan sedang dibahas. Tidak ada maksud tidak percaya dari DPR kepada Novanto,” kata Adies, Kamis (16/11/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam, Adies menjabarkan telah



Wakil Ketua MK DPR RI, Adies Kadir (F-PG) memberikan keterangan kepada wartawan.

terjadi perdebatan diantara fraksi dalam mengambil sikap terkait Setya Novanto, meski pada akhirnya MKD memutuskan akan mengambil sikap sesuai dengan UU MD3. “Ada beberapa kawan dari fraksi lain yang menanyakan masalah Setnov. Memang dari jam 1 sampai jam 3 ini kami mengadakan rapat telah terjadi perdebatan yang dinamis,” ungkap Adies.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan MKD tidak akan mengambil sikap jika status Setya Novanto masih berstatus tersangka. Karena itu, DPR sangat tidak ingin melangkahi proses hukum yang kini

sedang berjalan. “Karena kasus tersebut masih ditangani aparat, jadi sesuai UU MD3 kami menunggu penanganan kasus dari aparat penegak hukum tersebut. Kemudian apa hasil dari aparat penegak hukum tersebut yang akan ditindaklanjuti,” terang Adies.

Sikap praduga tidak bersalah harus dijalankan selama proses hukum Setya Novanto masih berjalan. DPR tegaskan tidak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum tersebut. Namun, masyarakat diminta untuk tidak gegabah dalam menyikapi kasus Setya Novanto ini. ■

(hs/sc), Foto:Jayadi/rni

Komisi IV Desak Usut Tuntas Penyelundupan Burung Kakaktua dan Nuri

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mendorong aparat penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk mengusut tuntas rencana penyelundupan 127 ekor Burung Kakatua Putih dan Nuri Bayan yang hendak diselundupkan dari Maluku Utara beberapa waktu lalu, termasuk membongkar jaringan di belakangnya.



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.

“Saya sangat prihatin dengan adanya upaya penyelundupan ratusan Burung Kakatua dan Nuri yang memang termasuk dalam hewan yang dilindungi negara. Saya mengapresiasi upaya aparat menggagalkan rencana penyelundupan tersebut dengan telah ditangkapnya beberapa orang pelaku. Tapi tentu, tidak hanya berhenti disitu saja. Aparat dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian LHK harus mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak terulang lagi. Karena saya yakin di belakang mereka ada jaringan yang ikut terlibat di dalamnya,” ujar Edhy

Edhy menambahkan Burung Kakatua dan Burung Nuri merupakan salah satu kekayaan alam khas Indonesia yang sulit dijumpai di bagian dunia lain. Ditambah karena keunikannya itulah, kedua spesies burung tersebut termasuk dalam

hewan yang dilindungi keberadaannya secara hukum.

Menurut UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, siapapun dilarang keras untuk menangkap, menjual, membeli maupun memelihara jenis satwa yang dilindungi.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, yang mengatakan bahwa peristiwa ini bukan yang pertama terjadi, oleh karena itu ia tidak hanya meminta pelaku untuk ditindak secara tegas, namun juga meminta pemerintah lebih menguatkan sistem perlindungan dan pengawasan terhadap satwa-satwa dilindungi.

“Saya minta perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam masalah penyelundupan hewan. Jangan sampai kekayaan Indonesia malah musnah di negeri sendiri,” imbuhnya.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar selanjutnya pelaku dilibatkan dalam pemeliharaan hewan di kawasan konservasi. Hal tersebut untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap alam dan isinya.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu petugas Polsek Halmahera Selatan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 127 ekor burung jenis Kakatua Putih dan Nuri Bayan dari Maluku Utara ke Filipina melalui Sulawesi Utara.

Burung-burung tersebut dimasukkan ke dalam paralon yang ujungnya diberi kawat sehingga persis seperti kandang. Karena kondisi tersebut, enam dari 127 burung tersebut mati. Sisanya dititipkan ke Seksi Konservasi Wilayah I Ternate, BKSDA (Balai konservasi sumber daya alam) Maluku untuk dikarantina terlebih dahulu sebelum akhirnya dikembalikan ke habitatnya. Sejauh ini polisi telah menangkap empat pelaku. ■

(ayu/sc), Foto: Kresno/od



Deputi Bidang Administrasi Mardian Umar berfoto bersama peserta Diklat Pelatihan Kewirausahaan di Gedung DPR, Senayan.



Deputi Administrasi Jangan Takut Menghadapi Pensiun

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mardian Umar menekankan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun, untuk tidak takut menghadapi masa pensiun. Ia mengajak kepada para pegawai untuk memperbaiki iman dan tauhid di masa mendatang.

“Jangan takut menghadapi pensiun, mari kita perbaiki iman dan tauhid kita untuk menghadapi masa depan,” kata Mardian, saat melepas peserta Diklat Pelatihan Kewirausahaan Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senin (20/11/2017).

Mardian berharap, dengan adanya diklat ini dapat mempersiapkan mental para pegawai yang akan memasuki masa pensiun untuk menghadapi masa depan. Ia pun berharap, mudah-mudahan setelah pembekalan ini dipanjangkan umurnya sampai memasuki masa pensiun.

“Atas nama Setjen dan BK DPR RI, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Ambillah sari ilmu yang bermanfaat. Karena, tidak ada orang yang lebih tinggi di hadapan Allah, selain orang yang berilmu,” tutup Mardian.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Diklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR RI Rusmanto mengatakan, diklat ini diperuntukkan bagi pegawai yang akan menghadapi masa pensiun pada 1-2 tahun mendatang.

“Tujuan dilaksanakannya diklat ini agar peserta memahami dan mengimplementasikan teori-teori persiapan masa pensiun yang diberikan selama diklat selama 4 hari di Bandung,” kata Rusmanto, sembari mengatakan bahwa diklat diikuti oleh 25 orang pada 20-23 November ini. ■

Bimtek LHKPN Beri Kemudahan Bagi Pegawai Setjen dan BK DPR RI

Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR RI Ignasius Bambang Rudianto berharap adanya Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat mempermudah para pegawai Setjen DPR RI dalam mengisi LHKPN dengan tetap menjaga privasi, fleksibel dan ketepatan waktu pengisiannya.

“Agar lebih simple, karena biasanya secara manual disampaikan kepada KPK dan itu memakan waktu, apalagi kepada staf atau orang lain atau mungkin kepada kami (Irtama) para pegawai yang wajib mengisi LHKPN itu pasti punya privasi dan tidak mau dilihat hartanya,” katanya usai menjadi moderator acara Bimtek Irtama di Ruang Rapat Banggar Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin, (20/11).

Selain itu lanjutnya, demi efisiensi maka digunakan E-LHKPN oleh KPK, dan nanti masing-masing wajib LHKPN itu punya password untuk menyampaikan harta kekayaannya melalui web. Setelah itu ada tanda terima dari KPK dan tembusannya disampaikan kepada Irtama. Unit kerja ini sebagai pengelola LHKPN harus memonitor apakah pejabat yang wajib LHKPN sebanyak 77 orang itu sudah menyampaikan LHKPNnya kepada KPK, dengan batas paling akhir Maret 2018.

Menurut Bambang, adanya kewajiban

untuk mengisi e-LHKPN tersebut mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Atas dasar itulah maka, pegawai ASN di seluruh Indonesia diwajibkan mengisi LHKPN tersebut.

Adapun pegawai yang diwajibkan mengisi LHKPN menurut Bambang meliputi pejabat eselon III yang menduduki jabatan strategis sebagai kepala bagian ULP atau sebagai bendaharawan pengeluaran, kemudian Eselon IV, Eselon II dan Eselon I juga auditor, yang keseluruhan berjumlah 77 orang. Untuk itulah dia berharap LHKPN dapat mengontrol harta kekayaan para pejabat.

“Harapannya untuk kontrol harta kekayaan para pejabat yang bertambah secara signifikan tetapi mencurigakan. KPK memang seperti itu melihatnya, dari mana hartanya, asal usul hartanya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan asal usulnya, berarti ada harta kekayaannya

dari korupsi atau manipulasi. Diharapkan para penyelenggara negara dapat mengelola anggaran dengan akuntabel, tidak bermain-main sehingga tidak terjadi korupsi,” papar Bambang.

Sementara Narasumber Bimtek Pengisian LHKPN, Ketua Tim Pendaftaran Direktorat PP LHKPN KPK RI Ben Hardy Saragih mengapresiasi kepatuhan Setjen dan BK DPR RI dalam melaporkan Harta Kekayaan (LHKPN) yang sudah hampir 90%. Adapun kepatuhan itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengetahui secara detail ciri-ciri orang yang melakukan manipulasi harta kekayaan.

“Untuk tipikor ciri-cirinya tentu sulit. Kita tidak bisa mengatakan yang bersangkutan ini punya harta kekayaan “ABCDEF” kemudian kita sangkakan bahwa itu diperoleh dari tipikor. Malah dengan LHKPN itu kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya harta ataupun aset yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara itu asal jelas, diperolehnya kapan, apa peruntukannya atau pemanfaatannya. Tapi untuk melihat apakah terindikasi tipikor itu pastinya harus kita lakukan pengecekan kembali yang lebih substantif ataupun pemeriksaan lagi didukung dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat,” jelas Ben menambahkan. ■

(ndy/mp), foto: Jayad/tni



Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR RI Ignasius Bambang Rudianto (kanan) membuka acara Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung DPR RI, Jakarta.



Kepala Biro Umum DPR RI Djustiawan Widjaya bersama pegawai Sekretariat jenderal saat mengadakan sosialisasi dan Launcing Aplikasi Kartu Tanda Pengenal.

Masuk Gedung DPR Akan Lebih Ketat

Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengadakan Sosialisasi dan Peluncuran Aplikasi Kartu Tanda Pengenal (AKTAL) sebagai pelaksanaan tugas akhir Diklat Pim IV Angkatan V, Senin (20/11/2017).

Kepala Biro Umum Djustiawan Widjaya mengatakan bahwa keamanan Gedung DPR RI berada dibawah kewenangannya, "Jangan sampai orang yang tidak jelas identitasnya bisa masuk dengan mudah tanpa adanya *scanning*," tuturnya.

"Masalah keamanan ini tidak bisa tawar menawar, semua parlemen di dunia itu memiliki keamanan dengan batasan yang jelas untuk masuk ke dalamnya. Di DPR ini bukan tidak terkendali tetapi semua orang bisa keluar masuk dengan

mudah. Nantinya masuk ke DPR akan lebih ketat," katanya saat diwawancara di Ruang Biro Persidangan, Gedung Setjen DPR RI.

Aktal sebagai proyek perubahan, dengan adanya Aktal ini bisa membuat para tamu terfilter dengan sistem yang ada. "Aplikasi ini untuk seluruh Anggota DPR RI, Tenaga Ahli, Pegawai DPR, Staf dan OB yang bekerja di DPR RI," tambahnya.

Dijelaskan, di Gedung DPR RI ini ada sebanyak 7.000 sampai dengan 9.000 orang yang berlalu-lalang setiap harinya,

dan ada area yang bisa dimasuki, ada juga area yang tidak bisa dimasuki. DPR ini, kata Djustiawan, terlalu bebas untuk dimasuki para tamu.

Area Gedung DPR seluas 42 Hektar ini, menurut Karo Umum DPR, tidak mudah dalam mengatur keamanannya, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengaturnya, "Adapun realisasinya harus segera tapi tentunya dengan koordinasi karena menyangkut dengan penyimpanan data yang besar dan jaringan yang kuat.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Pamdal Herry Ardyanto mengatakan bahwa selama ini pendataan masih manual, "Dengan sistem yang baru ini semoga menjadi momentum bagi keamanan DPR, dan saya berharap semoga ini bermanfaat bukan hanya proyek ecek-ecek saja," jelas Herry. ■

(chas,mp), foto:azka/rni

DPR Sapa Masyarakat Palembang di Humas Layanan Publik Expo 2017

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berkesempatan menyapa masyarakat Palembang dalam acara Humas Layanan Publik Expo 2017 yang akan berlangsung pada Rabu-Kamis, 22-23 November 2017, di PSCC Palembang.

“Kita akan siap melayani masyarakat Palembang dalam memberikan informasi yang bersifat publik,” ungkap Kepala Bagian Humas Dadang Prayitna didampingi Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial Moh. Djazuli dan Kasubag TVR Parlemen Ibnurkhalid Yunus dalam Dialog Interaktif di RRI Palembang, Selasa (21/11/2017).

Dadang menyampaikan, kehadiran Humas DPR di Palembang dalam rangka mengikuti pameran humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Tak hanya itu, lanjutnya, Humas sebagai penghubung masyarakat ke wakilnya dapat menjadi jembatan aspirasi.

Karena itu, Tim Humas dan Pemberitaan Parlemen DPR RI mengajak masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk datang ke lokasi pameran. Sebab, stand DPR RI membuka layanan pengaduan publik dan terbuka untuk umum.

“Silahkan saja yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasinya datang ke booth DPR RI. Kita sangat terbuka apalagi kepada masyarakat yang ingin minta data terkait informasi kegiatan kedewanan,” papar Dadang.

Kepada masyarakat Palembang, Kabag Media Cetak dan Sosial DPR RI Mohammad Djazuli juga

mensosialisasikan program DPR dalam genggaman. Dimana kegiatan kedewanan dapat diakses melalui media sosial dan website resmi DPR RI.

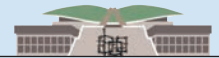
“Diharapkan berita yang disajikan, dapat melengkapi sudut pandang publik dalam menanggapi isu-isu terkini. Masyarakat juga bisa berinteraksi langsung dengan para wakilnya melalui program siaran langsung di facebook dan instagram DPR RI,” jelasnya.

Sebagai informasi, masyarakat Palembang yang ingin berpartisipasi langsung dan memeriahkan acara tersebut dipersilahkan datang ke stand Sekjen DPR RI. Peserta bisa mengikuti lomba mencari bintang orator ataupun DPR Challenge untuk mendapatkan hadiah menarik. Selain itu disediakan juga *photo booth* untuk pengunjungan yang bisa *dishare* di media sosialnya masing-masing dengan hastag #DPRrumahRakyat. ■



Kabag Humas Dadang Prayitna, Kabag Media Cetak dan Sosial M Djazuli dan Kasubag TVR Parlemen Ibnurkhalid Yunus berkesempatan berdialog dengan masyarakat Palembang di RRI.

(am/nc), Foto: Andri/ri



DPR Gelar Lomba Orasi

Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI mencari bintang orasi dengan tema "Kalau Saya Anggota DPR". Lomba ini berlangsung dari tanggal 22 - 23 November 2017 dalam acara Humas Layanan Publik Expo 2017 yang berlangsung di PSCC, Palembang.

“Ajang ini diharapkan dapat melahirkan anggota DPR masa depan, bahkan Soekarno muda. Sebab, publik sangat merindukan orator kelas dunia sekelas Soekarno yang terkenal pintar berorasi,” ungkap Kasubag Radio Parlemen Ibnu Khalid di PSCC.

Lebih lanjut, Ical sapaan akrabnya, mengungkapkan kesempatan ini merupakan momentum yang baik bagi generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya sekaligus melatih orasi.

Selain untuk melatih mental peserta, sambungnya, lomba orator dipilih karena untuk menjadi anggota DPR, seseorang harus memiliki kemampuan istimewa dalam berbicara dan menyakinkan orang lain.

Terlebih arti Parlemen sendiri dari bahasa Perancis “Le Parle” yang berarti *to speak* atau berbicara. Kata inilah yang menjadi dasar parlemen sehingga muncul istilah Parlemen.

“Jadi, anggota parlemen seharusnya piawai untuk bicara menyampaikan pemikiran, ide, program lebih spesifik dalam mengawasi kinerja pemerintah,” jelasnya.

Lomba Orasi Bintang terbuka untuk kalangan umum, siswa dan mahasiswa. Tiga orator terbaik akan dinobatkan sebagai “Bintang Orator Televisi Radio Parlemen DPR RI” serta mendapatkan hadiah menarik. Selain orasi, stand DPR juga menyediakan fitur DPR Challenge untuk peserta yang mengunjungi expo layanan humas yang mulai dibuka pada hari ini, Selasa (21/11/2017).

Rencananya, pameran humas layanan publik akan dibuka secara resmi pada esok hari oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. ■

(ria.mp), Foto : Andri/itri



Masyarakat mengikuti lomba orasi dengan tema " Kalau Saya Anggota DPR", pada acara Humas Layanan Publik Expo 2017.



Baleg DPR dan Komisi IX DPR melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan, Senin (20/11). Foto: Runi

Komisi II DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Dimana akan ada perubahan mengenai pengaturan, pengelolaan dan kebijakan-kebijakan tentang pertanahan di Indonesia, Rabu (22/11). Foto: Jayadi



Anggota BKSAP DPR, Andreas Hugo Pareira menerima kunjungan kehormatan Dubes Sudan Abdul Azis Abdalla terkait peningkatan hubungan kerjasama kedua negara di berbagai bidang, di Gedung DPR, Rabu (22/11). Foto: Jaka